

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA SUNGAI SEGAK
KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2021**

Oleh :

KAMELISA^{1*}

E1011161128

Martoyo^{2*}, Isdairi^{2*}

*Email: Kamelisaputri@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134), Isi kebijakan mencakup: 1). Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan : a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, manfaat yang dihasilkan dengan adanya musrenbang didesa sungai segak yaitu terbangunnya infrastruntur jalan Rabat beton didesa sungai segak, b. Derajat Perubahan yang diinginkan yaitu proses implementasi kebijakan musrenbang yang sudah terlaksana merupakan hasil dari mufakat bersama dalam musrenbang, c. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan musrenbang didesa sungai segak masih terjadi ketimpangan, dimana aspirasi dari masyarakat marginal dan kaum perempuan sering tersingkat dalam proses penetapan program, d. Pelaksana Program, Pemeritah desa beserta Tim Musrenbang dan melibatkan Partisipasi Masyarakat, e. SumberDaya yang dikerahkan, tim pemandu musrenbang didesa sungai segak cukup memadai dan mampu menyelesaikan program musrenbang dengan terarah sesuai dengan visi dan misi desa sunai segak. 2). Kontek Impelentasi: a. Kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat, program musreimbang ini melibatkan pemerintahan tingkat desa yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat agar meningkatkan pastisipasi masyarakat dari berbagai aspek, b. karakteristik lembaga dan penguasa, masih terjadinya ketimpangan kedudukan serta masih adanya pemisahan suara minoritas terhadap kaum marginal, c. Kepatuhan dan Daya Tanggap pemerintah desa bersama warga desa mengajukan pembangunan jalan rabat beton dikarenakan anggaran dana desa yang masih minim sehingga jalan rabat beton merupakan salah satu solusi mereka dalam menjawab persoalan melalui kebijakan program musrenbang desa didesa sungai segak.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Musrenbang

ABSTRACT

This research aims at analyzing the implementation process of the Planning and Development Forum (Musrenbang) in Sungai Segak Village, Sebangki Sub-district, Landak Regency in 2021. The research used a qualitative research method with a descriptive analysis. It referred to a theory of Grindle (cited in Nugroho, 2006:134). The policy content covered: 1) Interests affected by the policy: a. The types of generated benefits. The benefits of the implementation of Musrenbang in Sungai Segak village was that of the construction of the concrete road infrastructure in the village of Sungai Segak, b. The degree of the expected changes, the implementation process of Musrenbang was the result of mutual agreement, c. The decision making, the decision making during the policy implementation of Musrenbang in Sungai Segak Village often yielded in discrepancies. The aspirations of marginal community and women were often ignored during the decision making process, d. Program executor, which involved the village government, Musrenbang team, and community participation, e. Resources, the Musrenbang team in the village of sungai segak was considered adequate and capable of completing the Musrenbang program in accordance with the vision and mission of Sungai Segak Village. 2) Implementation context: a. refers to the power, interests, and actors involved in this musrenbang program. The program involved the village government in collaboration with community leaders to increase community participation from various aspects, b. the characteristics of institutions and the leaders, there was still inequality in position and there was still a separation of minority voices against the marginalized, c. Compliance and Responsiveness, The village government and the villagers proposed the construction of a concrete road due to the low budget of village funds so that the concrete road was one of their solutions in answering the problem through the village Musrenbang program policy in Sungai Segak Village.

Keywords: Implementation, Policy, Musrenbang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) Tahun Anggaran yang direncanakan. Musyawarah perencanaan pembangunan yang sering disebut dengan Musrenbang, merupakan sarana Pemerintah disemua tingkatan, untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua aspek kehidupan masyarakat. Disisi lain musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan cerminan dari praktik Partisipasi warga sekaligus area akuntabilitas Pemerintah, baik dari jajaran pimpinan Daerah, kalangan masyarakat dengan berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat berbagai inspirasi mengenai program daerahnya dengan tujuan Musrenbang sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana

KerjaPemerintah Daerah RKP
Nandang & Saeful (2008:15).

Musrenbang sebagai salah satu bentuk pencapaian kesepakatan tentang prioritas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan juga untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat yang mana advokasi masyarakat akan dibawa pada tingkatan yang lebih tinggi, karena dikira penting bagi masyarakat untuk mengembangkan kemajuan Daerahnya dalam prespektif pembangunan tersebut.

Kebijakan tentang Musrenbang Desa berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun anggaran 2020-2024 dengan menimbang penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang masih diberlakukan untuk RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah) tingkat nasional sesuai peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 selama 5 Tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

(SPPN). Dalam pasal 1 ayat 21 dinyatakan bahwa musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun kerja Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan untuk tingkat desa Sungai Segak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sungai Segak Tahun anggaran 2021 Dalam pedoman tersebut dijelaskan pada pasal 5 bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sungai Segak.

Musrenbang pernah diadakan pada Tahun 2020 tepatnya hari jumat tanggal 5 Desember dimana hanya segelintir masyarakat (Ketua RT) yang ambil peran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki.

Musrenbang adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk

mendiskusikan dan menyepakati pembangunan daerah. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak

Program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Program yang diajukan dalam forum Mesrenbang didesa Sungai Segak meliputi Program pembangunan yang diatur dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa mengenai Musyawarah Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi pembangunan fisik dan non fisik Pembangunan Fisik meliputi Pembuatan Jalan Poros desa, Air Bersih, Lampu Penerangan Jalan, Pembangunan TK, Renovasi Gereja, Renovasi Masjid dan Rehap Polindes sedangkan Pembangunan Non Fisik mencakup tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Namun yang terjadi di Desa Sungai Segak ketika musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Desa (musrenbang) pada Desember

Tahun 2020 diadakan untuk menyepakati program yang akan dilaksanakan Tahun 2021 baik fisik dan non fisik untuk kemajuan di Desa sungai segak.

Berdasarkan musyawarah hasil rembuk warga dan para Pemerintah Desa yang dihasilkan dari Musrenbang tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan:

1. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan program hanya dilakukan oleh segelintir petinggi Desa tanpa melibatkan keikutsertaan warga.
2. Forum Musrenbang belum optimal diimplementasikan karna, suara masyarakat miskin dan kaum wanita tersingkir dalam penetapan program pembangunan diDesa.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan maka identifikasi masalah adalah :

1. Kurangnya Partisipasi keterlibatan Masyarakat kaum miskin dan kaum perempuan dalam Forum Musrenbang diDesa Sungai Segak.

2. Implementasi kebijakan Forum Musrenbang tidak berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah pada “Proses Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2021.”

4. Rumusan Permasalahan

Seperti apa Proses Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2021.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian “Untuk mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2021?

6. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Khususnya Ilmu Administrasi Publik Kajian Kebijakan Publik mengenai Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermamfaat bagi masyarakat di Dusun Retok Maju Desa Sungai Segak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi para (PEMDES) Di Dusun Retok Maju Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten landak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori

a. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implemantasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan

harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Implementasi Kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Teori Grindle (dalam Nugroho, 2006:134), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation):

1. isi kebijakan mencakup: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, aktor terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya taggap, Kedudukan pembuat

kebijakan, pelaksanaan program,
dan sumber daya yang dikerahkan.

2. Konteks Implementasinya adalah :
Kekuasaan, kepentingan, strategi.

Kerangka Pikir Penelitian

Judul
Implementasi Kebijakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Di Desa Sungai
Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten
Landak Tahun 2021.

Output
Keberhasilan Proses Implementasi
Kebijakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Di Desa
Sungai Segak Kecamatan Sebangki
Kabupaten Landak Tahun 2021.

Masalah Penelitian
1. Kurangnya Partisipasi keterlibatan
Masyarakat kaum miskin dan kaum
perempuan dalam Forum Musrenbang
didesa Sungai Segak.
2. Implementasi kebijakan Forum
Musrenbang tidak berjalan secara
optimal dan tepat sasaran.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Moleong (2007:11)
mengemukakan bahwa penelitian
deskriptif menekankan pada data berupa
kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka yang disebabkan oleh adanya
penerapan metode kualitatif.

Teori
Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) :
1) Isi kebijakan mencakup:
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh
kebijakan.
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
c. Derajat perubahan yang diinginkan
d. Kedudukan pembuat kebijakan
e. Pelaksana program, dan
f. Sumber daya yang dikerahkan.
2) Konteks Implementasinya Adalah:
a. Kekuasaan, kepentingan, strategi
aktor terlibat
b. Karakteristik lembaga dan penguasa
c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Penelitian ini dilakukan di Kantor
Desa letaknya di Desa Sungai Segak
Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak.
Adapun yang menjadi subjek dalam
penelitian ini terdiri dari:
1. Sekretaris Desa Sungai segak.
2. Ketua Rt/Dusun Desa Sungai Segak.
3. Tokoh Masyarakat Desa Sungai Segak.
4. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan
Desa)

Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini yaitu pada Proses Implementasi kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Sungai Segak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak Tahun 2020.

D.Hasil Penelitian

1. Isi Kebijakan (Content Of Public)

Ada 6 Indikator dalam dimensi ini, antara lain :

a. Kepentingan yang di Pengaruhi Oleh Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan menurut Grindle (dalam Agustino 2016:142), menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji pada implementasi kebijakan Musrenbang yang diadakan didesa Sungai Segak dalam permasalahan pembangunan potensi desa, dimana kelompok kepentingan ini masuk pada kelompok *insideryang* terjun langsung pada program kebijakan sebagai

kelompok penggerak atau aktor kebijakan itu sendiri, dimana kebijakan ini mempengaruhi berbagai aspek tatanan desa baik dari segi pembangunan, pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai aspek penunjang dalam pembangunan desa yang berpengaruh pada pendapatan desa dengan melibatkan beberapa kelompok kepentingan dimasyarakat sebagai salah satu syarat agar Musrenbang tersebut dapat dilaksanakan.

Salah satu tugas Tim penyelenggara Musrenbang dan Tim pemandu adalah mengupayakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang biasanya tidak hadir dan berbicara diforum musyawarah desa seperti kelompok miskin, kelompok minoritas, perempuan, generasi muda. Peran dan tugas peserta Musrenbang didesa sungai segak adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses musyawarah sampai proses pengambilan keputusannya. Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu

mendengar aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar Musrenbang benar-benar menjadi forum rembug warga yang tujuannya untuk pembangunan potensi didesa sungai segak.

b. Jenis Manfaat Yang Akan di Hasilkan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari hasil Musrenbang yang terimplementasikan dengan baik, mereka bersyukur dengan adanya Musrenbang yang diadakan pemerintah desa dalam menjawab beberapa permasalahan dalam segi Akses sarana dan prasarana desa baik berupa akses jalan maupun gertak beton yang dibangun dibeberapa RT/RW atau Dusun yang ada didesa sungai segak ini. Walaupun bukan hanya dengan diadakannya Musrenbang bisa menjawab permasalahan dan memajukan pembangunan didesa sungai segak masih banyak program lainnya.

Proses Musrenbang benar-benar harus sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbang yang sudah ada seperti yang sudah dijabarkan peneliti diatas, hasil

Musrenbang benar-benar merupakan rencana program/kegiatan pembangunan desa untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin (Marginal).

c. Derajat Perubahan Yang di Inginkan

Menurut Grindle (dalam Nugroho 2016:142), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik dapat memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Implementasi Kebijakan Musrenbang didesa sungai segak menginginkan sebuah perubahan bagi masyarakat desa maupun citra baik Kantor Desa Sungai Segak demi

kemajuan Desa, melalui salah satu Program Pembangunan Desa dengan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dimana dalam korum rapat ini akan menghasilkan sebuah kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk program yang disepakati bersama, apa yang menjadi kendala selama ini yang dihadapi Desa Sungai Segak, walaupun sebenarnya Musrenbang selalu diadakan setiap Tahunnya untuk perencanaan Program Pembangunan Desa yang masih menjadi pokok permasalahan pada akhir tahun untuk periode tahun berikutnya yang dihadiri berbagai komponen masyarakat sampai Pemerintahan Desa yang ikut serta didalam korum rembug tersebut, warga desa sangat terkendala dalam akses jalan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak Pengambilan keputusan pada kebijakan Musrenbang didesa sungai segak tergantung pada panitia proses pelaksana musrenbang itu sendiri karena musrenbang yang ideal itu bukan hanya

berasal dari kehadiran jumlah peserta tapi kebijakan panitia musrenbang mengenai persiapan apa yang menjadi bahan/pokok permasalahan yang benar-benar bersifat penting (*urgent*).

Dalam proses pengambilan dalam Musyawarah Musrenbang yang diadakan didesa sungai segak untuk Tahun Anggaran 2021 yang sudah terlaksana pada awal bulan januari lalu dengan hasil keputusan akhir musrenbang desa adalah dokumen RKP desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan-kesepakatan masalah prioritas bersama warga.

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan sebuah organisasi. Dalam proses tersebut, organisasi harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk pengambilan keputusan dengan baik, sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar

organisasi akan berdampak pada pengambilan keputusan.

e. Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan.

Pelaksana program yang ambil bagian dalam Musrenbang desa adalah TPM (tim pelaksana musrenbang), tim pelaksana ini merupakan tim yang mempersiapkan dari proses, perencanaan, pelaksanaan, dan sampailah tahap output/hasil yang didapatkan dalam forum musrenbang tersebut dibawah ini merupakan tahapan dalam proses musrenbang yang dilakukan oleh TPM (tim pelaksana musrenbang).

f. Sumber Daya Yang di Kerahkan

Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia

(SDM), merupakan kendala utama yang dihadapi dalam sebuah organisasi dimana manusia/individunya itu tersendiri harus mampu melihat kualitas dan potensi yang dimilikinya, serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin, Musrenbang merupakan sebuah forum rembug warga yang bukan hanya sekedar musyawarah biasa namun, kelompok kepentingan yang terlibat didalamnya merupakan musyawarah yang menghasilkan sebuah program pembangunan desa yang mensejahterakan desa.

Kemampuan seorang kepala desa dalam menggerakkan staff/pegawai desa merupakan tugas yang tidaklah mudah karena harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan, memahami, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik untuk melakukan hal tersebut mereka harus paham kelebihan/potensi yang dimiliki staff atau pegawainya sesuai bidang mereka, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya agar lebih baik.

2. Konteks Implementasi (Context of Policy), Ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini :

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat.

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2016:142) kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Menurut Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Setiap penetapan sebuah program dalam musrenbang bukanlah hal yang mudah dimana harus mampu memberikan hasil yang dapat memuaskan banyak pihak baik dari kelompok kepentingan, produk yang dihasilkan dalam musrenbang itu bukan lah berupa produk yang langsung jadi tetapi berupa penampungan aspirasi-aspirasi yang membangun, serta program yang akan dilaksanakan nantinya, karena sebelum dilaksanakannya Musrenbang pada

tingkat desa program dengan skala prioritas sudah terlebih dahulu ditetapkan beberapa yang harus terlaksana, hanya memerlukan beberapa aspirasi untuk kelanjutan dari mufakat tersebut.

b. Karakteristik Lembaga & Penguasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Situasi dan kondisi kelembagaan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan penguasa yang kadang terkesan otoriter dalam melakukan kebijakan yang telah dituangkan dalam program musrenbang tersebut. Terkadang penguasa selalu menempatkan kepentingannya terdahulu tanpa melihat aspirasi/pandangan masyarakat marginal dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang pada akhirnya untuk rakyat akan berdampak langsung juga bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelas lagi peneliti mencoba mewawancarai Staff Desa

selaku Kaur Bapak” M” ia berpendapat: “Hal ini tergantung dari gaya kepemimpinan seseorang dalam organisasi misalkan permasalahan yang baru terjadi pada kepala desa sungai segak dimana beliau melakukan tindakan KKN terhadap Anggaran Dana Desa (ADD), kalau selama jadi kepala desa beliau memang santai dalam menanggapi permasalahan yang ada serta kurangnya pendekatan kepada masyarakat sehingga beliau jarang terjun langsung kepada masyarakat terkadang cenderung melalui perwakilan dari antara kami, hal ini merupakan gaya kepemimpinan yang kurang sehat sehingga ia bisa melakukan tindakan KKN, karena manusia sejatinya bukanlah mahluk yang sempurna terkadang lupa akan jabatan dan tamak akan kekuasaan kami berharap nantinya kepala desa yang akan menggantikan mampu membawa perubahan bagi wajah desa sungai segak ini”.

Dari pendapat diatas peneliti bisa melihat bahwa implementasi kebijakan Musrenbang didesa sungai segak tidak berjalan dengan baik masih terjadi

ketimpangan sosial, dimana suara masyarakat miskin (marginal) dan kaum perempuan sering tersingkir dalam penetapan prioritas program, aspirasi mereka hanya dianggap angin lalu dalam musyawarah, karena masih terjadi struktur piramida dalam musyawarah dimana suara kaum laki-laki akan lebih unggul dibanding kaum perempuan.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap harus dimiliki sebagai implementor karena, mereka harus paham tentang apa yang menjadi tupoksi mereka, salah satunya dalam musyawarah perencanaan pembangunan didesa sungai segak sebagai aparatur pemerintah yang bekerja pada tingkat desa mereka harus memahami betul permasalahan yang dihadapi desa, apa yang menjadi titik pokok permasalahan agar dalam forum musyawarah mampu menjadi jawaban yang dihadapi warga desa sungai segak walaupun dalam proses implementasi program musrenbang belum sepenuhnya optimal.

Pemahaman warga tentang proses perencanaan pembangunan belum merata di seluruh masyarakat desa sungai segak. Sehingga kurang memahami ketika ditanya kesesuaian antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa belum terdapat kesesuaian antara rencana dengan kebutuhan masyarakat. Ini ditandai dengan beberapa kegiatan prioritas yang diusulkan desa/kelurahan tidak terakomodir dalam prioritas kegiatan kecamatan, karena keterbatasan anggaran yang belum mampu membangun akses jalan yang memiliki ketahanan lama.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Isi Kebijakan (*Content Of Public*)
Ada 6 Indikator dalam dimensi ini, antara lain :

a. Kepentingan Yang di Pengaruhi Oleh Kebijakan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ini tergantung kepada perilaku oleh kelompok kepentingan yang mampu membawa pengaruh kepada kelompoknya, salah

satunya pada proses pelaksanaan implelementasi musrenbang didesa sungai segak, walaupun masih sering terjadi sistem otoriter dimana hanya kelompok elit saja yang memberikan pera besar dan kelompok marginal hanya sebagai peserta yang menyempurnakan isi musyawarah tersebut, karena selama ini proses musyawarah perencanaan pembangunan didesa sungai segak belum secara maksimal dilakukan artinya masih sering terjadi ketimpangan sosial, dan mereka belum sepenuhnya bisa menyuarakan aspirasi mereka yang lebih mengalami ketimpangan sosial didesa sungai segak.

b. Jenis Manfaat Yang Akan dihasilkan, merupakan manfaat yang akan diterimamasyarakat nantinya ketika output musrenbang tersebut sudah diimplementasikan, salah satu outputnya yaitu pelaksanaan program pembuatan jalan rabat beton dimasing-masing RT/DUSUN yang sudah diterima manfaatnya secara

langsung oleh masyarakat desa sungai segak, walaupun pembangunan jalan tersebut belum bersifat benar-benar permanen.

- c. Derajat Perubahan Yang diinginkan, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap perencanaan sebuah produk kebijakan akan selalu ada proses implementasi yang panjang sehingga pembuat kebijakan harus benar-benar paham apa yang menjadi topuksi mereka agar mampu memenuhi permintaan masyarakat, salah satunya proses implementasi kebijakan musrenbang yang sudah terlaksana merupakan hasil dari mufakat bersama dalam musrenbang, sehingga dalam perencanaan pembangunan desa sudah terlihat pada askes pembangunan jalan rabat beton dimana masyarakat sudah menerima manfaatnya secara langsung.
- d. Letak Pengambilan Keputusan, merupakan bagian terpenting dalam kebijakan dan ini melibatkan stakeholder atau pemangku kebijakan dimana setiap kebijakan yang diambil

harus mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan masyarakat, pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan musrenbang di desa sungai segak masih terjadi ketimpangan, dimana aspirasi dari masyarakat marginal dan kaum perempuan sering tersingkat dalam proses penetapan program.

- e. Pelaksanaan Program, ini melibatkan para pemangku kepentingan dalam pemerintahan desa mereka yang memiliki peran sebagai pelayan masyarakat, dalam penelitian ini dimana pemerintahan desa harus benar-benar paham tujuan diadakannya musrenbang baik dari tahap pra-musrenbang sampai tahap pelaksanaan musrenbang tersebut, agar dalam proses musyawarah dapat terselenggara dengan kondusif.
- f. Sumber Daya Yang dikerahkan, Kemampuan seorang kepala desa dalam menggerakkan staff/pegawai desa merupakan tugas yang tidaklah mudah karena harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan,

memahami, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik untuk melakukan hal tersebut mereka harus paham kelebihan/potensi yang dimiliki staff atau pegawainya sesuai bidang mereka, dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya agar lebih baik.

2. Konteks Implementasi (*Context of Policy*), Ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini :

- a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat, Setiap penetapan sebuah program dalam musrenbang bukanlah hal yang mudah dimana harus mampu memberikan hasil yang dapat memuaskan banyak pihak baik dari kelompok kepentingan, produk yang dihasilkan dalam musrenbang itu bukan lah berupa produk yang langsung jadi tetapi berupa penampungan aspirasi-aspirasi yang membangun, serta program yang akan dilaksanakan nantinya, dimana kami selalu mengkedepankan program yang

benar-benar menjadi skala prioritas dalam pembangunan desa.

- b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa, terkadang penguasa selalu menempatkan kepentingannya terdahulu tanpa melihat aspirasi/pandangan masyarakat marginal dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang pada akhirnya diperuntukkan untuk rakyat yang berdampak langsung juga bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Kepatuhan dan Daya Tanggap, Kepentingan masyarakat disini adalah menyangkut kebutuhan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan masyarakat setempat lebih mengetahui dan merasakan langsung apa yang menjadi permasalahan hidup dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi, jika dikaitkan dengan musrenbang dimana pada forum musrenbang ini mereka merencanakan pembangunan jalan rabat beton didesa sungai segak kecamatan sebangki, dikarenakan akses jalan didesa sungai segak belum memadai masih jalan

setapak tanah kuning, jadi pemerintah desa bersama warga desa mengajukan pembangunan jalan rabat beton dikarenakan anggaran dana desa yang masih minim sehingga jalan rabat beton merupakan salah satu solusi mereka dalam menjawab persoalan.

2. Saran

1. Isi Kebijakan (*Content Of Public*) Ada 6 Indikator dalam dimensi ini, antara lain :

a. Kepentingan Yang di Pengaruhi Oleh Kebijakan, sarannya dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan pada Musyawarah perencanaan pembangunan pemerintah didesa sungai segak harus selalu mengutamakan masyarakat sehinggadampak dari hasil kebijakan mampu memberikan manfaat yang mensejahterakan masyarakatnya, dan dalam forum musrenbang pemerintah desa harus lebih melibatkan masyarakat marginal dan kaum perempuan karena mereka juga memiliki hak yang sama.

b. Jenis Manfaat yang Akan di Hasilkan, kalau berbicara manfaat yang dirasakan dengan diadakannya Musrenbang didesa sungai segak sudah langsung dirasakan oleh masyarakat, semoga pada priode musrenbang yang terlaksana nantinya juga mampu melihat potensi dan permasalahan yang benar-benar harus ditangani.

c. Derajat Perubahan Yang diinginkan, Pemerintah desa harus mampu melihat problema dalam masyarakatnya agar mampu menjawab setiap persoalan melalui program musrenbang.

d. Letak Pengambilan Keputusan, sarannya pada bagian ini merupakan bagian terpenting dalam proses pelaksanaan musrenbang, karena aktor yang terlibat adalah pemerintah desa sungai segak yang harus memahami jalannya sebuah kebijakan apakah bisa dilaksanakan tanpa merugikan pihak lain, serta mampu menjadi pendengar yang baik ketika forum musrenbang diadakan.

e. Pelaksana program, sarannya pemerintah desa harus memiliki sikap

yang transparansi dan akuntabel dalam implementasi program musrenbang.

- f. Sumberdaya Yang dikerahkan, sarannya program musrenbang yang diadakan bukan berdasarkan kesepakatan 2 orang saja, namun pemerintah desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi bagi kemajuan desa melalui Program Implementasi Kebijakan Musrenbang.

2. Konteks Implementasi (*Context of Policy*), Ada 3 Indikator Dari Dimensi Ini :

- a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat, sarannya buat para pemerintah desa, mereka harus lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya apa yang menjadi keluhan mereka, serta lebih memberikan kesempatan untuk warga ikut berpartisipasi mengemukakan aspirasinya dalam membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa agar lebih maju.
- b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa, kalau dilihat dari itu sistem yang masih

diterapkan pemerintah kantor desa yaitu sistem otoriter dimana tidak adanya kebebasan untuk pegawai/staff desa untuk mengembangkan ide dan gagasan mereka.

- c. Kepatuhan dan Daya Tanggap, Maka pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dari Program Musrenbang, mereka harus dituntut memahami jalannya proses musrenbang serta mampu menjadi stakeholder yang mengayomi dan menjadi pelayanan masyarakat sesuai tanggungjawab mereka agar membawa perubahan pada pembangunan di desa sungai segak.

F.REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori&Aplikasi*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2003, *Kebijakan Publik: Konsep Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kusumanegara, Solohuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Grava Media: Yogyakarta.
- Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Khusus*, Yogyakarta: YPAPI.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsive*. Bandung : Hakim Publishing.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soenarko, 2005, *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Cetakan Kedua. Jakarta: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&G*. Alfabeta: Bandung.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses & Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan :
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tingkat Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Rencana Pembangunan Menengah
Tingkat Kabupaten.

Pemerintahan Desa Sungai Segak
Tahun 2021.

Peraturan Desa Sungai Segak Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja

